

CO-VALUE

JURNAL ILMIAH EKONOMI, KOPERASI & KEWIRAUSAHAAN



Analisis Perbandingan Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap Berwujud pada Beban Pajak

Oleh: **Endang Walyuninguh**

Mempertahankan Eksistensi Bisnis, Melalui Pengembangan Bauran Pemasaran

Oleh: **Nanik Risnawati**

Kajian Pembentukan Layanan Badan Usaha Daerah

Oleh: **indra Fahmi**

Peluang Pengembangan Usaha Koperasi

Oleh: **Lety Savitri Dewi**

Kualitas Kewirausahaan Individu dan Pembentukan Kewirausahaan Teknologi

Oleh: **Tiena Gustina Amran dan Suarny Amran**

Delusi Koperasi Pertanian dan Dinamika Perdesaan

Oleh: **Ery Supriyadi R.**

Peran Informatika dalam Dunia Bisnis: Telaah Pemahaman dan Karakteristiknya

Oleh: **Dadan Hamdani**



ISSN: 2086-3306

CO-VALUE

Jurnal Ilmiah Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan

Vol. IV No.1/April/Tahun 2014

ISSN: 2086-3306

PELINDUNG

Rektor Ikopin
Burhanuddin Abdullah

PENASEHAT

Wakil Rektor I Bidang Akademik
Dindin Burhanudin, IKOPIN

Wakil Rektor II Bidang Kerjasama
Yuanita Indriani, IKOPIN

Wakil Rrektor III Bidang Administrasi, SDM, Keuangan, RTP, Humas dan Umum
Indra Fahmi, IKOPIN

PEMBINA

Ketua Program Studi Manajemen
Gijanto Purbo Suseno, IKOPIN

REDAKSI AHLI

Rm. Ramudi Arifin, IKOPIN
Yuyun Wirasasmita, UNPAD
Tuhpawana Piatna Sendjaja, UNPAD
Burhan Arief, UNPAD
Faisal Afif, UNPAD
Ina Priamina, UNPAD
Hakim Malasan, ITB
Sugiyanto, IKOPIN
Ery Supriyadi R., IKOPIN

PEMIMPIN REDAKSI

Wahyudin, IKOPIN

WAKIL PEMIMPIN

Eka Setiajatnika, IKOPIN

REDAKSI ANGGOTA

Nurhayat Indra, IKOPIN
Sukmahadi, IKOPIN

TATA USAHA DAN SRKULASI

Sri Hidayati
Didi Mulyadi

Alamat Penerbit/Redaksi
IKOPIN

Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 20,5 Jatinangor
Tel/Fax. 022-7798179 email: lppm@ikopin.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menerbitkan Jurnal Ilmiah Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan Vo. IV No.1/Apri/Tahun 2014. Semoga isi dalam Jurnal ini dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi bagi pembaca dalam melaksanakan tugas maupun pekerjaan yang dihadapi

Harapan kami, semoga Jurnal Ilmiah Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan ini, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik (e-jurnal) dapat membantu menambah pengetahuan, inspirasi dan pengalaman bagi para pembaca.

Dalam rangka upaya untuk lebih kearah kesempurnaan dalam penerbitan jurnal ini, kami mnegharapkan kepada semua pihak terlebih kepada para pembaca ang budiman untuk tidak sungkan dan senantiasa memberikan masukan-masukan ataupun saran serta dorongan moril maupun materil. Untuk itu sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan pneghargaan yang setinggi-tingginya.

Demikian kami sampaikan, selamat membaca, semoga bermanfaat.

Jatinangor, April 2014
Redaksi

CO-VALUE

Jurnal Ilmiah Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan
Vol. IV No.1/April/Tahun 2014
ISSN: 2086-3306

DAFTAR ISI

Analisis Perbandingan Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap Berwujud Pada Beban Pajak (Studi Kasus pada PT. Unilever Indonesia Tbk) Oleh : Endang Wahyuningsih	1 - 10
Mempertahankan Eksistensi Bisnis, Melalui Pengembangan Bauran Pemasaran Studi Kasus pada Bisnis Perhotelan Oleh :Nanik Riswati	11-22
Kajian Pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah Oleh: Indra Fahmi	23-32
Peluang Pengembangan Usaha Koperasi di Era Globalisasi Oleh: Lely Savitri Dewi	33-42
Kualitas Kewirausahaan Individu Dan Pembentukan Kewirausahaan Teknologi Oleh: Tiena Gustina Amran dan Suarny Amran	43-56
Delusi Koperasi Pertanian Dan Dinamika Perdesaan Oleh: Ery Supriyadi R.	57-66
Peranan Informatika Dalam Dunia Bisnis: Telaah Pemahaman Dan Karakterisasinya Oleh: Dadan Hamdani	67-76

DELUSI KOPERASI PERTANIAN DAN DINAMIKA PERDESAAN

Ery Supriyadi Rustidja
 Institut Manajemen Koperasi Indonesia
erysupriyadi354@gmail.com

ABSTRAK

Proses transformasi sosial ekonomi budaya secara evolutif akan mempengaruhi perilaku dan kelembagaan masyarakat perdesaan. Pembangunan koperasi Indonesia selama ini mengalami fluktuasi, jatuh bangun sejalan dengan perubahan sosial perdesaan dan juga seiring dengan latar belakang perubahan format sosial politik Indonesia. Kualitas kehidupan berkoperasi dan kinerja kelembagaan koperasi yang disinyalir rendah dan lemah berkait erat dengan faktor pendidikan manajerial koperasi, pendidikan anggota dan pengurus koperasi, serta penyuluhan nilai, jati diri, dan prinsip koperasi. Sejauhmana keberadaan koperasi pertanian, bagaimana prospek dan ekspektasinya dalam pembangunan pertanian maupun perdesaan menjadi pertanyaan yang relevan seiring dengan tantangan globalisasi maupun inklusivitas ekonomi. Artikel ini berisi tulisan delusi koperasi pertanian dan perdesaan, yang dilakukan dengan penelusuran substansial berdasar pada partisipasi observasi dan studi literatur. Strategi dan aksi komunikasi membutuhkan ruang gerak nyata untuk menumbuhkembangkan koperasi pertanian Indonesia seiring dengan tantangan globalisasi maupun inklusivitas ekonomi yang semakin menguat.

ABSTRACT

The transformation process of cultural socio-economic will affect behavior and institutional of rural communities evolutively. Today, Indonesian cooperatives has been development fluctuating, falling and down in line with rural social change and also the Indonesian social and political format changing. The quality of life and performance of cooperative are closely related to cooperative managerial education, member education and cooperative management, as well as extension service values, dual identity membership, and cooperative principles. How far the existence of agricultural cooperatives, how the prospects and expectations in agricultural and rural development become relevant questions in line with the challenges of globalization and economic inclusiveness. This article contains a paper on the delusions of agricultural and rural cooperatives, conducted with substantial based on participative of observations and literature studies. Strategy and communicative action requires real effort to develop Indonesian agricultural cooperatives in line with the challenges of globalization and inclusive economy.

Keyword : cooperative, rural, agriculture, delusion, pembangunan

PENDAHULUAN

Sejarah telah mencatat bahwa kebangkitan awal koperasi Indonesia terjadi di Purwokerto dan Tasikmalaya. Format

officialisasi, deofficialisasi, dan otonomi yang merupakan tahap terencana dan pembangunan koperasi Indonesia mengalami stagnasi bahkan kebuntuan,

ketika terjadi perubahan sosial politik di Indonesia, termasuk kejadian reformasi tahun 1998 hingga saat ini. Demikian pula halnya, fenomena perkembangan berbagai jenis dan kegiatan koperasi di Indonesia mengalami pasang surut pula sejalan dengan perubahan kepemimpinan nasional maupun kepala daerah selama orde reformasi.

Pembangunan memiliki makna membangun, membangkitkan, dan mengembangkan sesuatu, termasuk juga pembangunan koperasi bermakna demikian. Koperasi adalah makhluk yang dibangun, dibangkitkan, dan dikembangkan untuk menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna, kemanfaatan yang nyata, dan ada dengan keberadaannya, sehingga perkoperasian dengan prinsip dan jati dirinya ada dan berkembang karena diakui keberadaannya melalui proses transformasi sosial ekonomi dan budaya secara evolutif mempengaruhi perilaku dan kelembagaan masyarakat itu sendiri.

Program pembangunan pertanian, sejak reformasi berlangsung hingga saat ini, terdapat indikasi keengganan menggunakan kelembagaan koperasi dalam pengembangan perdesaan dan pertanian. Hal ini nampak dari kebijakan pertanian yang cenderung menggunakan istilah gabungan kelompok tani (Gapoktan) sebagai satu satuan pengembangan ekonomi petani dalam satu hamparan. Termasuk pula kebijakan pembangunan perdesaan melalui Undang-undang tentang Desa yang menempatkan BUMDES sebagai terminologi kebijakannya. Salah satu faktornya berkait erat dengan kegagalan dan kinerja KUD dalam berbagai kegiatan pembangunan perdesaan maupun terbengkalainya berbagai kasus KUT maupun kredit program di perdesaan

yang melibatkan pengurus/anggota koperasi yang belum terselasai secara tuntas.

Tahun 2017, tercatat secara nasional terdapat sekitar 205.000 koperasi di Indonesia dengan berbagai jenis, bentuk kegiatan usaha, dan tingkatannya, namun hanya 20% nya saja yang berkualitas. Kualitas kehidupan berkoperasi dan kinerja kelembagaan koperasi yang disinyalir rendah dan lemah berkait erat dengan faktor pendidikan manajerial koperasi, pendidikan anggota dan pengurus koperasi, serta penyuluhan nilai, jati diri, dan prinsip koperasi. Kondisi ini akan semakin diperparah lagi dengan keterbatasan penyuluh koperasi maupun penggerak koperasi pada tingkat nasional dan daerah, bahkan dalam beberapa kajian disinyalir terjadinya degradasi secara kuantitas maupun kualitasnya.

Keadaan koperasi Indonesia maupun koperasi di Indonesia miris terdengar dengan desibel yang relatif rendah setara dengan keberadaan visual koperasi saat ini. Terlebih lagi jika ditelisik dari strategi pembangunan perdesaan selama kurun waktu 20 tahun terakhir, cenderung mengalami loncatan dari yang semula berbasis pada pertanian, kepada basis jasa dan industri. Loncatan pendekatan pembangunan merupakan keniscayaan, namun beresiko tinggi. Pembangunan koperasi Indonesia nampaknya juga mengalami jatuh bangun senasib dengan perubahan sosial perdesaan dan juga seiring dengan latar belakang perubahan format sosial politik Indonesia.

Dari fenomena di atas muncul pertanyaan sejauhmana keberadaan koperasi pertanian, bagaimana prospek dan ekspektasinya dalam pembangunan pertanian maupun perdesaan. Masih adakah ruang gerak

untuk menumbuhkembangkan koperasi pertanian Indonesia seiring dengan tantangan globalisasi maupun inklusivitas ekonomi yang semakin tinggi.

METODE PENULISAN

Artikel ini mencoba mendeskripsikan delusi koperasi pertanian berkait dengan pembangunan pertanian-perdesaan. Penulisan dilakukan dengan penelusuran substansial berdasar pada partisipasi observasi dan studi literatur.

KAJIAN PUSTAKA

Secara makro, Todaro (2000) mengungkapkan bahwa komponen pembangunan sedikitnya terdiri dari pemenuhan kecukupan (*sustenance*), peningkatan harga diri (*self esteem*), dan kebebasan (*freedom*). Pembangunan pertanian berarti melibatkan berbagai pelaku, tindakan, dan peraturan kebijakannya yang akan membentuk bingkai kinerja hasil usaha, kelembagaan, maupun keorganisasian pertanian dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasar dari pemikiran ini, maka koperasi pertanian seyakinya berkecukupan, berjatidiri koperasi, dan bebas mengambil keputusan secara mandiri dalam organisasi dan usahanya, tanpa dikooptasi oleh kebijakan ataupun kepentingan tertentu.

Hajer (2003) menyatakan bahwa kebijakan tanpa kearifan merupakan suatu kejanggalan. Demikian pula halnya dengan koperasi di Indonesia, maka suatu kebijakan memerlukan aturan yang jelas dan norma-norma yang menurut politik yang akan dilakukan dan kebijakan dibuat dengan langkah-langkah yang harus disepakati. Kekosongan kelembagaan menyebabkan kegagagalan fungsi dan peran kelembagaan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Khanna & Palepu (1997,200 dan Shleifer & Visny (1993)

menyebutkan sebagai suatu "kekosongan kelembagaan" atau "institutional void". "*institutional void : there are no clear rules and norms according to which politics is to be conducted and policy measures are to be agreed upon*". Sejalan dengan ini, Dryzek (1982) menyebutkan bahwa kebijakan itu "*divided and incoherent*", sehingga kebijakan itu dapat menyebabkan ketiadaan peran suatu lembaga atau terjadinya kekosongan kelembagaan pada suatu proses pembangunan atau wilayah.

Kehadiran koperasi sebagai institusi ekonomi rakyat dipertanyakan oleh para elite politik dan atau masyarakat. Koperasi pertanian "ditidakhadirkan", padahal posisinya strategis dalam kebijakan maupun ekspektasi terhadap koperasi bagi pemberdayaan masyarakat petani dan perdesaan. KUD kurang dipercaya oleh petani, bahkan oleh tereliminasi oleh perancang kebijakan pertanian. Sementara dalam konteks dunia, Stiglitz (2009) menyebut koperasi sebagai agen pembaharu yang mampu mengentaskan kemiskinan, sementara di Indonesia koperasi "ditidakhadirkan". Muncul pertanyaan, bukankah keadaan ini menunjukkan terdapat indikasi kegalauan pengembangan koperasi di Indonesia. Khanna & Palepu, (1997,2000) dan Shleifer & Visny (1993) sebagai *institutional void*.

Upaya memberi fungsi dan peran koperasi dapat memunculkan nilai-nilai budaya berkoperasi, bahkan dalam iklim globalisasi terdapat manfaat dan peran positif koperasi terhadap ekonomi dunia (Stiglitz, 2009). Davis (1995) menyatakan bahwa koperasi memperkaya anggotanya dan memberdayakan masyarakat sekitar, selain itu koperasi juga mengembangkan perilaku orang.

Strukturalisme dan Esensialisme Koperasi

Koperasi seringkali dianggap sebagai wadah ekonomi pinggiran, kumuh, dan kurang menguntungkan. Padahal secara esensi, justru koperasi yang menjadi jaring dan katub pengaman kegiatan ekonomi di negara berkembang maupun maju. Padahal data menunjukkan bahwa negara-negara dengan berkehidupan koperasi berindex gini sebesar 0,24-0,3. Negara-negara yang koperasinya kuat menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang mampu menopang kesejahteraan segenap ekonomi rakyat yang bergerak pada berbagai kegiatan produksi, konsumsi, maupun distribusi.

Koperasi mampu menjadi *agent of development, actor of change*, dan penggerak roda perekonomian local, regional, nasional, bahkan internasional. Perhatikan koperasi konsumsi dan koperasi pertanian di Jepang, Koperasi susu di Denmark, Koperasi di Korea, Koperasi Mondragon di Spanyol, Koperasi Kredit di Kanada dan Amerika. Koperasi itu mampu bertahan dari guncangan krisis ekonomi dengan kekuatan kerjasama dan jati diri koperasi, sehingga selain memberi nilai manfaat ekonomi langsung maupun tidak langsung kepada para anggotanya, koperasi juga berkontribusi pada perekonomian regional dan nasional dalam bentuk *cooperative share* dan *cooperative effect*. Kondisi ini dapat dicapai dengan suatu upaya dan langkah strategis terstruktur yang menempatkan koperasi sebagai ruh kehidupan ekonomi demokratis, pasar berkeadilan, dan kerja sama dalam berbagai kegiatan ekonomi yang bernilai manfaat bagi semua pihak.

Koperasi sebagai wadah usaha dibangun dan membangun kebersamaan, solidaritas,

demokratis, dan kolektivitas. Dalam perspektif pertumbuhan, maka koperasi merupakan organisasi keahlian dan teknologi yang memungkinkan memiliki kompetensi yang diperlukan (*necessary*) dan kompetensi yang unggul (*advantage*). Untuk itu penguatan koperasi didekati dengan menjembatani nilai koperasi berbasis sinkronis (kontekstual-kekinian-waktu yang sama) dan diakronis (masa lalu-antar waktu), sehingga kekuatan ideologis koperasi akan terjalin mantap, dinamika usaha koperasi yang kuat. Koperasi ditempatkan sejajar pada interaksi pasar yang berkeadilan pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Koperasi akan memiliki daya saing dan menjamin perkembangan keusahaannya apabila diikuti dengan komitmen kuat berkoperasi yang diwujudkan lewat perilaku dan praktek berkoperasi, selain kebijakan yang afirmatif bagi pengembangan koperasi.

Memperkokoh pemikiran, regulasi, dan praktek berkoperasi akan memunculkan koperasi yang teguh memegang prinsipnya, menolong diri (*self-help*), serta memiliki solidaritas, kolektivitas, kooperativisme yang tinggi. Kondisi ini membentuk karakter esensi keberadaan koperasi. Kerjasama berorganisasi dan usaha bersama dari koperasi secara internal maupun eksternal didukung oleh bSDM berspirit koperasi, profesional, inovatif, maka koperasi mampu meraih kesempatan sekaligus menghadapi tantangan global. Membesarkan peran koperasi dalam pasar domestik maupun global pada komoditas pertanian strategis, akan semakin mendatangkan manfaat bagi anggota koperasi maupun petani dan masyarakat. Keadan ini akan secara simultan mendorong daya saing dan daya tahan koperasi dalam mekanisme pasar

berkeadilan yang bersumber dari pasar global. Sejalan dengan paradigm pengembangan ekonomi local, seharusnya koperasi dapat berperan aktif memberi kontribusi dan dampak yang positif pada komoditas/produk pertanian strategis dari tingkat local, nasional hingga internasional. Koperasi pertanian seperti ini mensyaratkan berbentuk koperasi apex, berskala besar, berlingkup luas, berorientasi pasar, berkeadilan dan teap menjaga jatidrianya sebagai koperasi.

DINAMIKA PENGEMBANGAN KOPERASI

Tidaklah dapat dipungkiri bahwa usaha mikro, usaha kecil dan koperasi merupakan bentuk organisasi dan usaha ekonomi rakyat memberi kontribusi yang cukup besar dan signifikan terhadap perekonomian. Pada saat krisis ekonomi, KUMKM selalu menjadi pengaman dan penyelamat sosial ekonomi masyarakat, lembaga ekonomi yang tahan guncangan. Namun demikian, kehadirannya masih dilihat sebelah mata. Sejalan dengan globalisasi dan reformasi di Indonesia, pemahaman berkoperasi di kalangan masyarakat dan generasi muda semakin luntur, bahkan lebih ironisnya lagi pendidikan koperasi pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dihilangkan, walaupun ada hanya sebatas sub bagian dari bab tertentu yang menjelaskan mengenai ekonomi.

Secara makro, kondisi ini menjadi titik kritis, keprihatian dan kepedulian bagi segenap insan pembangunan Indonesia. Pembiaran dan ketidakpedulian terhadap penyuluhan dan pendidikan perkoperasian berkonsekuensi pada semakin rendahnya keberadaan dan perkembangan kehidupan berkoperasi di Indonesia, sementara secara yuridis formal, koperasi menjadi salah satu

ruh pembangunan Indonesia serta wadah usaha pembangunan yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Pada sisi meso, perubahan transaksi antar wilayah dan antar negara semakin inklusif dengan berbagai variasi strategi maupun kegiatan usaha. Prinsip efisiensi dan nilai guna virtual dalam rantai nilai maupun rantai pasokan produk strategis pada sektor pertanian menjadi *key performance indicator* dalam kegiatan usaha. Keadaan ini menjadi tantangan, sehingga dibutuhkan sentuhan kelembagaan dan perubahan perilaku dalam usaha pertanian. Koperasi pertanian harus mampu berperan aktif dan bernilai manfaat dalam mengembangkan nilai tambah dari transaksi yang terjadi atau menjadi aktor transaksional aktif, bukan menjadi penonton atau bahkan terhisap oleh lembaga lain.

Secara mikro, kualitas tumbuh dan berkembangnya koperasi ditentukan oleh partisipasi anggotanya dalam memanfaatkan layanan usaha dan mengembangkan organisasi koperasi. Menumbuhkembangkan partisipasi anggota dalam bentuk kontribusi modal, pemanfaatan layanan unit usaha, keaktifan dalam rapat anggota, kebertanggungjawaban atas risiko usaha, merupakan bagian penting bagi kesehatan usaha dan organisasi koperasi. Keadaan ini akan terwujud apabila nilai, prinsip, dan jati diri koperasi pada segenap anggota, pengurus koperasi maupun manajer dan masyarakat terbenam secara tepat dan masif melalui proses transformasi sosial, perubahan sikap, maupun perilaku dalam kehidupan berkoperasi. Pendidikan anggota dan penyuluhan perkoperasian menjadi salah satu kunci bagi proses pembenaman nilai, prinsip, dan jati diri

koperasi yang hakiki. Keadaan ini yang dapat mengakselerasi koperasi berdaya guna mengembangkan usaha, meningkatkan profesionalitas pengurus koperasi, dan memberikan nilai tambah dalam bentuk manfaat ekonomi langsung dan manfaat ekonomi tidak langsung secara sosial ekonomi bagi anggota dan masyarakat.

Memperhatikan tantangan makro, meso, maupun mikro, maka penyuluhan perkoperasian menjadi penting bagi keberadaan koperasi sebagai organisasi dan mendesak bagi pengembangan usaha koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan. Intervensi terhadap masyarakat petani melalui gerakan koperasi pertanian sebagai organisasi maupun badan usaha ekonomi rakyat berjalan sejajar dengan upaya pengembangan ekonomi perdesaan, sehingga ekonomi masyarakat perdesaan akan semakin lemah, jika pemahaman, sikap dan keterampilan berusaha dan berorganisasi dalam berkoperasi juga lemah; atau sebaliknya. Disinilah pentingnya gerakan koperasi direvitalisasi pada kawasan perdesaan.

DILEMATIKA PERTANIAN-PERDESAAN

Pertumbuhan ekonomi bertujuan mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selama beberapa tahun terakhir tercatat beberapa sektor strategis Disamping itu, Indonesia dikaruniai keanekaragaman hayati yang melimpah, bahkan berbagai macam suku dengan corak ragam budayanya yang unik, menjadi potensi yang sangat kuat untuk dikembangkan menjadi destinasi-destinasi pariwisata bertaraf internasional. Potensi alam berupa sumberdaya angin, ombak, dan gas bumi juga dapat didayagunakan

seoptimal mungkin bagi kemashlahatan masyarakat perdesaan.

Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian dan pariwisata mendorong kinerja ekonomi Indonesia, jika dikelola secara profesional akan memberikan nilai tambah (*added value*) baik secara ekonomi, sosial (jasa) dan lingkungan (sumberdaya). Nilai tambah bertaut erat secara kedepan maupun ke belakang dengan kegiatan pertanian-perdesaan. Jika dikaitkan dengan globalisasi, maka sedikitnya terdapat milyaran orang wisatawan sebagai potensi besar pasar terbuka pariwisata yang dapat diraih. Pertanyaan yang muncul adalah sejauhmana kesempatan ini dapat dicapai yang bernilai tambah bagi pengembangan pertanian-perdesaan, termasuk pengembangan koperasi pertaniannya.

Kawasan perdesaan memiliki potensi sumberdaya, namun seringkali memiliki keterbatasan kemampuan mengelola dan memanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhannya. Seiring dengan kelemahan daya adaptasi maupun antisipasi dalam mengelola sumberdayanya, maka timbul fenomena *leakage economic* yang sering terjadi di kawasan perdesaan. Fenomena ini juga selayaknya dapat diantisipasi oleh koperasi jika dan hanya jika koperasi pertanian berperan dalam pengembangan perdesaan.

Dalam pembangunan perdesaan yang bersumbu pada pangan dan energi memerlukan upaya srius dalam mengembangkan komoditas unggulan guna mendapatkan nilai tambah. Tentunya diikuti dengan perolehan hasil yang harus kembali pada pelaku utamanya, yaitu petani agar dapat memperoleh manfaat dan semakin berkembang. Jika hal ini dilakukan, maka akan memberi *multiplier effect* dan *linkage economy* bagi ekonomi

perdesaan. Jika tidak dilakukan, maka pembangunan pertanian-perdesaan akan berujung pada pengurasan sumberdaya ekonomi, kerusakan lingkungan, dan marginalisasi masyarakat.

Komoditas unggulan yang bersumber dari potensi domestik digali melalui gerakan ekonomi kerakyatan. Penciptaan nilai tambah dan ikatan kerjasama gerakan ekonomi rakyat harus dikembangkan melalui pola kerjasama secara kohesif-koperatif. Muncul pertanyaan bagaimana memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutannya.

DELUSI KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN PERTANIAN

Pembangunan dapat berarti mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, mengurangi disparitas, dan pengentasan kemiskinan melalui proses transformasi multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan struktur sosial, sikap mental, maupun kelembagaan. Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor strategis yang secara signifikan mempengaruhi dimensi pembangunan, sehingga bentuk kebijakan hulu-hilir dari pertanian juga akan menyangkut pada perubahan sosial, sikap mental, dan kelembagaannya, hingga berujung pada pertumbuhan ekonomi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan aspek ekologis-lingkungan.

Prinsip keberlanjutan pembangunan pertanian dari aspek keusahaan, keekonomian, kelembagaan, harus dirancang bangun secara sengaja terencanakan (*extended by design*). Rencana-rencana ini dibangun atas konstruksi pemikiran yang komprehensif, holistik, dan teleologik dengan

memperhatikan dinamika sistem agribisnis yang tengah berlangsung, mempertimbangkan perspektif pasar, manajerial usaha, dan berorientasi industrialisasi produk pertanian pada masa yang akan datang. Misalnya peremajaan tanaman sebagai salah satu langkah strategis dalam pengembangan industri sawit, maka selayaknya dikonstruksikan dari aspek proses perubahan sosial, pertumbuhan ekonomi, pengembangan kegiatan budidaya, maupun pengembangan kelembagaan koperasinya yang mendukung keberlanjutan sawit sebagai sistem agribisnis maupun agroindustri.

Konstruksi pengembangan pertanian selayaknya dibangun oleh fondasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan yang sinergis, saling keterkaitan, sinkron, dan berkelanjutan. Konstruksinya meliputi konstruksi sosial ekonomi, sosial budaya, ekologis-lingkungan pertanian, misalnya dari hulu sampai hilir dalam sistem agribisnis dan agroindustri perkebunan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan koperasi pertanian juga dapat dilihat dari tingkat kemanfaatannya baik secara sosial ekonomi petani dan usaha di sekitarnya. Manfaat ini berupa manfaat komersial dan manfaat sosial ekonomi. Manfaat komersial diukur melalui finansial usaha perkebunan yang dilakukan koperasi, sedangkan manfaat sosial berupa ikatan sosial, kohesivitas antar petani, budaya bertani, tingkat transaksi, perilaku saling berbagi yang diterima oleh para petani, masyarakat dan pelaku usaha kecil mikro yang ada.

Arah pembangunan pertanian di Indonesia mengalami dinamika yang berjenjang dari mulai pola tradisi-konvensional sampai modern-profesional. Misalnya, pola

pengusahaan perkebunan yang cenderung mengelola berdasarkan pada ketergantungan pada kondisi alam, intuisi, orientasi komoditi, serta kelembagaan yang cenderung inefisien bergeser menuju kepada optimalisasi pengelolaan sumberdaya berkelanjutan, penggunaan iptek sebagai landasan utama pengambilan keputusan, berorientasi pasar, serta kelembagaan yang efisien. Dengan demikian, pola pengusahaan perkebunan melalui koperasi harus menuju perkebunan yang memperhatikan nilai tambah, daya saing, daya tahan, keberlanjutan, dan efisiensi.

Industrialisasi pertanian membutuhkan manajemen usaha yang didukung oleh keterampilan tinggi, teknik produksi yang canggih, pembiayaan yang efisien, peralatan pengolahan yang berorientasi pasar dan kualitas produk, serta investasi yang besar. Agroindustri dari produk pertanian yang dihasilkan secara ekonomis dalam skala besar, misalnya model perkebunan rakyat dalam bentuk usaha perkebunan kooperatif. Perkebunan kooperatif berbasis pada prinsip usaha *plantation* akan memberikan curahan pendapatan dari proses produksi maupun pengolahan hasil panennya, disertai dengan serapan dan nilai tenaga kerja. Variabel ini menjadi penerimaan langsung bagi sekitar kawasan perkebunan, sehingga koperasi pertanian memberi manfaat ekonomi, nilai tambah dan pendapatan bagi petani dan wilayah.

Koperasi menjadi wadah ekonomi usaha mikro, usaha kecil dan menengah, bahkan diharapkan menjadi lembaga yang mengembangkan demokrasi ekonomi pada berbagai sektor maupun produk strategis. Terlebih lagi melihat tantangan globalisasi, *free trade*, kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN. Fenomena

transborderless trading area yang semakin inklusif akan mengakselerasi globalisasi mengejar kompetisi antar wilayah, hingga menempatkan Indonesia harus mampu sejajar dengan negara lainnya. Demikian pula pengembangan koperasi Indonesia sejalan dengan koperasi pada tingkat dunia (Global Coop 300 atau Development 300), sehingga pengembangan koperasi Indonesia membutuhkan kapabilitas sumber daya manusia yang kokoh (*robust*); kokoh dalam mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki dan menciptakan instrumentasi inovasi yang sanggup bekerja sama dengan koperasi pada negara lainnya guna membangun jejaring usaha koperasi yang kuat dan memberi manfaat (*benefit*) bagi koperasi dan para anggotanya.

Posisi koperasi dicitrakan sebatas dalam rangka menarik calon anggota/modal dan atau melayani anggota koperasi yang berujung pada kegagalan bisnis. Delusi Koperasi muncul sejalan dengan meningkatnya alienasi terhadap kreasi koperasi dalam menjangkau akses interaksi bisnis yang efisien dan menguntungkan. Indikasi alienasi koperasi, diantaranya berupa penetapan posisi koperasi dalam konstitusi ekonomi yang dianggap belum berkeadilan, praktek dualisme sektor keuangan koperasi dalam usaha pertanian yang penuh risiko. Pemikiran dan praktek alienasi berujung memampatkan koperasi sebagai wujud lembaga tertinggal. Secara normatif, koperasi diposisikan sebagai wadah ekonomi usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang strategis. Namun secara faktual, keberadaan koperasi cenderung

terpinggirkan atau terindikasi mulai tersingkir dalam kegiatan ekonomi perdesaan maupu pertanian.

KONKLUSI DAN IMPLIKASI

Koperasi pertanian Indonesia perlu mengubah perilaku untuk menghadapi perubahan yang tengah terjadi, sejalan dengan itu, peran penyuluh dan penggerak perkoperasian kontemporer sangat dibutuhkan. Hal ini diharapkan mampu merevitalisasi perdesaan yang mulai tergerus oleh efek sentripetal perkotaan maupun globalisasi. Sedikitnya terdapat lima strategi merevitalisasi koperasi pertanian, yaitu pengembangan kebijakan yang pro-koperasi, penguatan kinerja usaha koperasi, profesionalisme pengurus koperasi, keaktifan petani-nelayan-pekebun untuk berkoperasi, serta strategi pencitraan positif terhadap koperasi pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Dryzek, J. 1982. Policy analysis as hermeneutic activity. Policy Sciences 14 : 309-329.*
- Dunn, W.N. (1981). Public Policy Analysis: An Introduction. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.*
- Hajer, M.A. (2003). 'A frame in the fields. Policy making and the reinvention of politics,' in M.A. Hajer and H. Wagenaar, eds., Deliberative Policy Analysis. Understanding Governance in the Network Society. Cambridge: Cambridge University Press.*
- Hajer, M.A. and H. Wagenaar, eds. (2003). Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society. Cambridge: Cambridge University Press.*
- Khanna, T., and Palepu, K. 1997. "Why focused strategies may be wrong in Emerging Market". Harvard Business Review, July-August : 41-51*
- , 2000. The future of Business Groups in Emerging Markets : Lon-run evidents in Chile . Academy of Management Journal, 43 (3) : 268-285.*
- Porter, Michael E. 1998. Competitive Advantage: Creating & Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.*
- Rustidja, Ery Supriyadi, 2014. Productivity Improvement Through Innovation Coop Small and Medium Enterprises International Symposium, KPA International Symposium in Indonesia, 22-24 August 2014. Korea Productivity Association (440-476) Sungkyunkwan Univ. Natural Sciences Campus Cheoncheon-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi, Korea.*
- Rustidja, Ery Supriyadi, Ina Primiana, Inem, Anita Padang. 2014. Strategi Pengembangan Supply Chain : Pengembangan Rumput Laut Di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Diselenggarakan Oleh: Unmas Denpasar Bekerjasama Dengan Forum Layanan IPTEK Masyarakat (Flip Mas) Wilayah Bali "Ngayah" Inna Grand Bali Beach Sanur-Bali 27-28 Februari 2014, ISBN : 978-602-18622-4-7, Hal.: 369 - 380 Penerbit : UNMAS Press Denpasar Bali,*

Stiglitz, D. Joseph. 2009. Moving Beyond Market Fundamentalism to A More Balanced Economy. *Annals of Public and Cooperative Economics* 80:3 2009 pp. 345–360